

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
RINGKASAN	xi
<i>SUMMARY</i>	xxi
DAFTAR ISI.....	xxvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	20
C. Tujuan Penelitian	21
D. Kegunaan Penelitian.....	21
E. Kerangka Konseptual	22
1. Korporasi.....	22
2. Perseroan Terbatas	25
3. <i>Brain Ware</i>	45
4. Perlindungan Hukum	47
F. Kerangka Teoritik	53
1. <i>Grand Theory</i>	53
a. Teori Keadilan	53
b. <i>Middle Theory</i>	53
2. <i>Applied Theory</i>	57
G. Kerangka Pemikiran.....	65
H. Metode Penelitian.....	66
1. Metode Pendekatan	66
2. Sumber Data Penelitian.....	67

3. Data Sekunder	68
4. Tehnik Pengumpulan Data	69
5. Tehnik Analisis Data.....	70
6. Sistematika Penulisan.....	71
7. Orisinilitas Penelitian	73
BAB II TINJAUAN UMUM	77
A. Perseroan Terbatas.....	77
B. Korporasi	82
1. Bentuk-bentuk Kejahatan Korporasi	83
2. Korban Kejahatan Korporasi.....	88
3. Faktor-faktor Pendorong Kejahatan Korporasi	89
4. Karakteristik Kejahatan Korporasi	91
5. Tindak Pidana Korupsi Korporasi	91
6. Kejahatan Menurut Masyarakat Awam.....	102
7. Pendekatan Kriminologis	104
8. <i>White Collar Crimes</i>	105
9. <i>Tiphology White Collar Crime</i>	107
10. <i>Corporate Crimes</i>	108
11. Contoh-contoh <i>Corporate Crimes</i>	111
12. <i>Type White Collar Crime</i> di Negara Barat	115
13. <i>White Collar Crimes</i> di Asia	119
14. <i>Blue Collar Crimes</i>	124
15. Kejahatan Terorganisir (<i>Organized Crimes</i>)	125
16. Kejahatan Transnasional (<i>Transnational Crimes</i>).....	125
17. Kejahatan Tanpa Korban (<i>Victimless Crimes</i>).....	126
C. Perjanjian dan Wanprestasi	127
D. Tindak Pidana Menurut Islam	146
E. Rekonstruksi Nilai-Nilai Religius.....	171
F. Teori Keadilan.....	184
G. Rekonstruksi Hukum	192
1. Sistem Peradilan Pidana	195
2. Pengertian Tindak Pidana.....	197
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	202
4. Pengaturan Hukum Pembuktian dalam RUU KUHP	204

5. Tanggung Jawab dan Kewajiban Negara	214
6. Undang Undang Kepolisian	221
7. Regulasi UU Hukum Pidana Perihal Kompensasi dan Restitusi.....	230
8. Pembentukan Unit Perlindungan Korban	241
9. UU Perlindungan Saksi Korban	246
10. Victim Report.....	251
11. Restoratif Justice Dalam Sarana Penal dan Non Penal.....	253
12. Sulh	257
13. Konsep Subrogasi.....	266
14. Konsep Subrogasi dalam Pemenuhan Hak Atas Kompensasi .	274
15. Study Komparatif Perlindungan Hukum Di Beberapa Negara Lain	286
BAB III SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU INDAK PIDANA KORPORASI SAAT INI YANG BELUM BERKEADILAN	296
A. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Korporasi Yang Belum Berkeadilan	296
B. Over View First Travel	296
C. Pelanggaran First Travel.....	300
D. Kasus Hukum First Travel	301
E. Dakwaan Terhadap First Travel.....	303
F. Penetapan Tersangka	305
G. Putusan Peradilan Pidana	305
H. Gugatan Perdata	306
H. Putusan PKPU	307
BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORPORASI SAAT INI.....	309
A. Kelemahan Sanksi Tindak Pidana Terhadap Tindak Pidana Korporasi Saat Ini	309
B. Kasus Pelanggaran Hukum First Travel	310
1. KUH Pidana	310
2. KUH Perdata	312
3. UU TPPU	313
4. UU Perlindungan Konsumen.....	315

5. UU Kepailitan dan PKPU	316
C. Tanggung Jawab Hukum First Travel	318
D. Kepailitan dan PKPU	322
E. Pelaksanaan Sanksi.....	325
F. Tuntutan Atas Kejahatan Korporasi.....	329
G. Jenis-Jenis Sanksi Korporasi	332
H. Rumusan Pertanggung Jawaban Pidana Pengelola Perusahaan	343
I. Alternatif Sanksi Pidana Tunggal Bagi Korporasi.....	349
J. Double Track System Sanksi Pidana.....	353
K. Perbandingan Sanksi Pidana Bagi Korporasi Di Beberapa Negara	357
BAB V REKONSTRUKSI SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANABRAINWARE YANG BERBASIS NILAI KEADILAN	367
A. Rekonstruksi Pasal-Pasal KUHP	368
B. Rekonstruksi Pasal-Pasal KUH Perdata	368
C. Rekonstruksi UU TPPU	369
D. Rekonstruksi UU PKPU dan Kepailitan.....	370
E. Rekonstruksi UU Perlindungan Konsumen	371
BAB VI PENUTUP	
A. Simpulan.....	376
B. Saran.....	379
C. Implikasi.....	384
DAFTAR PUSTAKA	386